



Masalah Parkir di Jogja Pelik

JOGJA—Tukang parkir yang *nuthuk* alias memungut tarif kelewat tinggi merupakan bagian dari peliknya problem perparkiran di Kota Jogja. Tanpa solusi cespleng, masalah itu sewaktu-waktu bisa muncul kembali.

*Beny Prasetya, I Ketut Sawitra Mustika, & Ujang Hasanudin
redaksi@harlanjogja.com*

- ▶ Terbatasnya lahan parkir tak hanya memancing keberadaan parkir ilegal, tetapi juga meningkatkan ancaman kemacetan.
- ▶ Ketegasan dari pemerintah diperlukan untuk menghukum juru parkir nakal agar mereka jera.

Keterbatasan lahan parkir diduga menjadi pangkal persoalan, baik berupa kemacetan maupun munculnya parkir ilegal yang menerapkan tarif mencekik leher. Kepala Unit Pengaturan Penjagaan Pengawasan dan Patroli (Turjawali) Polresta Jogja AKP Tugiman menengarai kepadatan kendaraan menuju pusat Kota Jogja, khususnya Malioboro, tidak bisa dibersihkan tanpa penambahan kantong parkir.

"Selama tempat parkir tidak memadai, masalah tak bisa selesai, karena volume kendaraan semakin hari tidak berkurang, malah meningkat," ujar Tugiman melalui sambungan telepon, Selasa (26/12) siang.

Selama tiga hari pada libur Natal dari Sabtu (23/12) sampai Senin (25/12), jalan-jalan menuju Malioboro sangat macet. Mobil hanya bisa merambat. Problem serupa berpotensi terulang pada libur Tahun Baru 2018 akhir pekan ini, ketika Malioboro steril dari kendaraan. Mobil maupun sepeda motor akan diarahkan untuk parkir di sirip-sirip Malioboro, sedangkan bus disediakan area parkir di Senopati dan Ngabean.

Instansi

Tindak Lanjut

1.

Negatif

Amat Segera

Untuk Ditanggapi

Masalah Parkir...

Kasat Lantas Polresta Jogja, Kompol Dwi Prasetyo, telah meminta Dinas Perhubungan Kota Jogja menyediakan lahan parkir tambahan untuk bus. "Titik menurunkan penumpang menuju Malioboro tetapi di Taman Parkir Ngabean, setelah itu bus bisa mencari lahan parkir lain," ujar Dwi.

Dinas Perhubungan Kota Jogja sudah menyediakan 11 kantong parkir resmi yang bisa menampung 190 bus, 740 mobil, dan 5.420 sepeda motor. Sayangnya, pada libur Natal kemarin, belasan area pemberhentian kendaraan tersebut tak sepenuhnya berfungsi. Parkir ilegal di luar lokasi yang ditentukan Pemerintah Kota Jogja tetap muncul dan imbasnya sangat mengecewakan pelancong.

Foto selebar karcis yang diunggah pengguna Facebook bernama Witwik Shopie menunjukkan tarif parkir di Alun-Alun Utara yang gila-gilaan. Ongkos parkir mobil dipatok Rp20.000 dan kendaraan travel Rp40.000.

Pada hal, menurut Peraturan Daerah (perda) Kota Jogja No.5/2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, tarif parkir untuk mobil hanya Rp2.000, bus sedang Rp15.000, dan bus besar Rp20.000. Dinas Perhubungan Kota Jogja tak berkutik karena tarif melewati mahal itu ditetapkan di wilayah parkir ilegal. Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Jogja Imanuddin Aziz mengatakan tidak pernah ada surat rekomendasi penyelenggaraan perparkiran di Alun-Alun Utara. Jika ada kantong parkir di kawasan tersebut, wewenang mengambil tindakan ada di tangan Kraton Ngayogyakarta sebagai pemilik lahan.

Rupanya, Kraton pun tidak pernah mengeluarkan surat izin kepada siapa pun untuk menjalankan usaha parkir di Alun-Alun Utara.

"Kraton enggak pernah berurusan dengan parkir," ucap Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono, Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura, atau semacam pejabat yang mengurus aset Kraton, lewat pesan pendek, Selasa (26/12).

Alun-Alun seharusnya steril dari segala macam aktivitas parkir, kecuali saat Pasar Malam Perayaan Sekaten (PPMS). Menurut Condrokirono, area yang dipasang rambu larangan parkir seperti di jalanan yang melingkari Alun-Alun Utara semestinya tidak dipakai sebagai lokasi pemberhentian kendaraan. Meski demikian, Condrokirono belum memastikan apakah pungutan di lokasi parkir ilegal itu akan ditertibkan atau dibiarkan saja.

M. Fuad Andreago, Ketua Forum Komunikasi Kawasan Alun-Alun Utara (FKKAU), mengaku telah merazia semua tukang parkir yang mematok bea Rp20.000. "Insyaallah tidak akan ada lagi, silakan dilaporkan ke kami jika masih menemukan tarif parkir yang keterlaluan di seputar Alun-Alun Utara."

Dia mengajak semua kalangan, baik masyarakat maupun sopir, membudayakan parkir di kantong parkir resmi yang telah disediakan di sekitar Alun-Alun Utara, seperti Senopati dan Ngabean. Lokasi itu memang agak jauh dari Malioboro dan Kraton, tetapi diperlukan untuk memerangi parkir liar. Fuad mendorong solusi penambahan area parkir. Dia menyarankan pihak-pihak yang ingin membuka lahan parkir di dekat Kraton meminta izin kepada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

"Supaya jalan lingkar Alun-Alun Utara dibuat aturan untuk tarif parkir, jadi jelas ketentuannya."

Ketegasan Pemerintah

Selain penambahan kantong parkir, tindakan tegas dari pemerintah juga diperlukan karena *nuthuk* pelancong menggunakan tarif parkir gila-gilaan akan mencoreng reputasi Kota Jogja sebagai destinasi wisata favorit.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan *nuthuk* yang terus terulang tiap musim liburan menunjukkan adanya kesalahan manajemen pengelolaan parkir di Jogja.

"Karena itu harus ada ketegasan dan perbaikan tata kelola parkir

karena ruang parkir di Jogja terbatas," ucap dia.

Politikus PDI Perjuangan ini mengharapkan Pemerintah Kota Jogja bisa bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk memberikan edukasi kepada tukang parkir agar memiliki jiwa pelayanan dan bukan cuma bekerja dengan prinsip aji mumpung.

"Jangan sampai wisatawan kapok datang gara-gara parkir *nuthuk*. Pemda DIY perlu segera berkoordinasi dengan jajaran pemerintah di level bawah untuk segera menyusun tata kelola parkir yang baik dan bisa menindak tegas parkir liar," kata Eko.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Kota Jogja menindak tegas juru parkir ilegal yang *nuthuk* wisatawan.

"Tidak ada lagi toleransi, karena sudah kami ingatkan berulang-ulang. Saya minta juru parkir nakal di *blacklist* [masuk daftar hitam], tidak boleh lagi mengelola parkir," kata Heroe kepada sejumlah awak media melalui sambungan telepon, Selasa.

Heroe tidak ingin persoalan serupa terus terulang saat liburan, entah itu pada Tahun Baru 2018, pakansi sekolah tahun depan, atau kala musim Lebaran tiba. Heroe sudah mewanti-wanti pelaku usaha pelancongan sejak libur Lebaran lalu ketika ada pedagang kaki lima (PKL) yang *nuthuk* wisatawan di kawasan Malioboro. Semua komunitas pedagang kemudian kompak dan memiliki komitmen bersama, salah satunya tidak memperbolehkan lagi PKL yang *nuthuk* untuk berjualan. Namun, masalah beralih ke perparkiran.

Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) ini menginginkan agar juru parkir ilegal di Alun-Alun Utara juga bisa dihukum dengan metode demikian.

"Karena tidak hanya merugikan juru parkir, tetapi juga merusak Kota Jogja, tidak mendukung kota yang ramah dan nyaman bagi wisatawan," ujar Heroe.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005